

Policy Brief September 2022

International NGO Forum on Indonesian Development www.infid.org

Temuan Kunci

Secara keseluruhan, kemajuan upaya pencapaian 17 SDGs di Indonesia menurut CSO yaitu 39 atau masuk dalam kategori "Kemajuan Rendah".

Tujuan yang mendapatkan skor tertinggi adalah Tujuan 4 (Pendidikan yang Berkualitas) dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), sedangkan Tujuan yang mendapatkan skor terendah adalah Tujuan 10 (Pengurangan Ketimpangan) dan Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau).

Rencana Aksi SDGs, Strategi & Anggaran mendapatkan penilaian paling tinggi. Pencapaian ini disusul oleh implementasi di tingkat nasional dan kerangka kebijakan. Namun, Indonesia masih perlu mendorong monitoring dan evaluasi yang dinilai masih kurang pencapaiannya.

Dari 4 pilar pembangunan, kebijakandi pilar pembangunan lingkungan dinilai kurang konsisten untuk menahan suhu bumi dibawah 1,5 derajat celcius sesuai dengan komitmen Indonesia di Perjanjian Paris (Paris Agreement).

82% CSO menganggap terbatasnya informasi menjadi hambatan untuk mendorong implementasi SDGs. Hambatan lain yaitu anggaran (76%), advokasi kebijakan dengan pemerintah (70%), Pengumpulan datadan Monitoring-Evaluasi (55%) serta pengetahuan mengenai SDGs (30%).

Menurut CSO, 66% Anak-anak rentan dan tertinggal dalam pembangunan, diikuti perempuan (62%) dan penyandang disabilitas (58%).

Kajian Cepat: Perspektif Masyarakat Sipil Mengenai Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pengantar dan Tujuan

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerjasama dengan Action for Sustainable Development (A4SD) menyusun Rapid Assessment "PeopleScorecard 2022" untuk memberikan gambaran implementasi dan tren keseluruhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia dari perspektif masyarakat sipil (CSO) pada periode 2021-2022. INFID secara reguler menyusun telah melakukan asesmen People Scorecard (PSC) pada tahun 2020 dan 2021.



Metode

Riset menggunakan metode Rapid Assessment Procedures (RAP), yaitu penelitian kualitatif untuk memahami suatu situasi dengan cepat. Penelitian diawali dengan survei yang diisi oleh 66 responden perwakilan CSO (47% perempuan dan 53% laki-laki, 52% adalah pengambil kebijakan di organisasi dan sisanya pelaksana program). Proses kedua yaitu FGD yang dihadiri oleh perwakilan CSO dan diakhiri dengan proses *expert review*.

10 indikator yang dianalisa dikelompokkan ke tiga parameter utama, yaitu Kebijakan Publik, Kapasitas Kelembagaan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif. Selanjutnya dilakukan Analisa per Pilar:

1. Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 1, 2, 3, 4, 5)
2. Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, 15)
3. Pilar Pembangunan Ekonomi (Tujuan 7, 8, 9, 10, 17)
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (Tujuan 16).



Tantangan di 3 Parameter Utama

SKOR PER INDIKATOR (DALAM PERSENTASE)



Dengan rata-rata skor 39%, CSO menilai upaya untuk mencapai 17 Tujuan SDGs di Indonesia masih tergolong rendah.

Parameter 1: Kebijakan Publik

Kebijakan yang "Trade-Off" dan Gap Pembiayaan SDGs

Berbagai kebijakan yang disusun dalam kurun lima tahun terakhir telah menghasilkan beberapa capaian indikator SDGs. Namun demikian, pada sisi lain capaian tersebut mengorbankan atau melemahkan capaian pada indikator SDGs lainnya. Misalnya kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan, dalam hal ini berkurangnya luas tutupan hutan yang menyebabkan naiknya emisi karbon. Di sisi lain, masih ada *gap* sekitar 14 ribu triliun antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan yang ada. Gap ini bahkan akan mengalami peningkatan sebesar 70% akibat pandemi COVID-19. Terlebih belum ada dana khusus yang dapat diakses masyarakat sipil untuk mendorong implementasi SDGs (Peluncuran Sustainability Report Danone Indonesia, BAPPENAS 2021).

Parameter 2: Kapasitas Kelembagaan

Lokalisasi SDGs yang kurang terintegrasi

Meskipun regulasi dan indikator SDGs dinilai cukup komprehensif di tingkat pemerintah pusat, masih ada berbagai kendala untuk menyelaraskan SDGs di tingkat daerah. Hal ini mulai dari komitmen, kapasitas, data, koordinasi, partisipasi serta anggaran yang terbatas. Saat ini, 31 dari 37 provinsi sudah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Tetapi banyak pemerintah daerah yang merasa bahwa indikator SDGs perlu ada penyesuaian konteks di daerah. Selain itu, mandat implementasi SDGs hanya sampai level provinsi dan belum cukup sampai di level Kabupaten/Kota.

Parameter 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif

Mekanisme Monev yang kurang maksimal dan minimnya *common understanding* dan partisipasi bermakna dengan CSO dan masyarakat

Pertama terkait Monev, CSO menilai sejauh ini belum ada platform yang sepenuhnya menampilkan Monev SDGs yang dilakukan CSO kepada pemerintah (meskipun sudah ada mekanisme *voluntary self-assessment* dengan format pelaporan self-assessment tool (SAT) yang disediakan).

Kedua mengenai derajat pengetahuan dan partisipasi terhadap SDGs. Mayoritas CSO menilai SDGs sangat penting tetapi belum mengetahui bagaimana cara mereka berpartisipasi di proses penyusunan kebijakan, misalnya dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs. Bahkan mayoritas kalangan masyarakat umum pun belum memahami SDGs dan substansinya.

Ketiga, CSO menilai partisipasi mereka dalam tata kelola SDGs belum cukup bermakna. sempitnya ruang dialog dengan pemerintah bagi CSO menyebabkan partisipasi yang hanya sebatas momentum dan situasional.

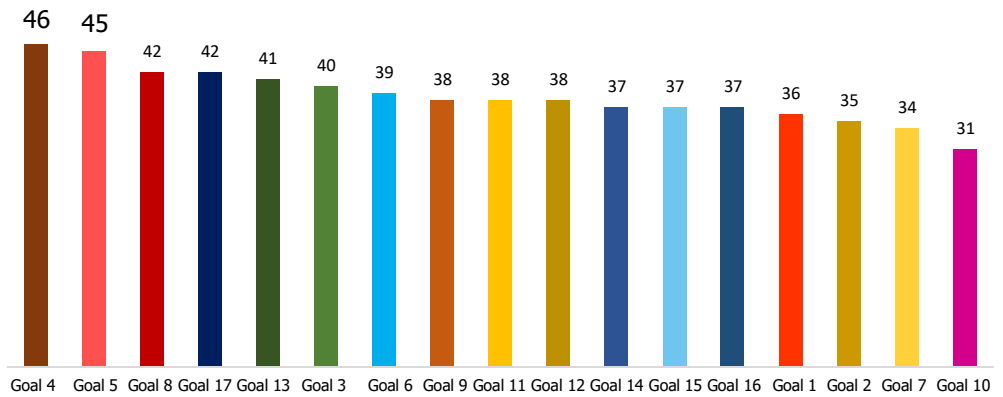
Prinsip Leave No One Behind dalam Implementasi SDGs

Urgensi perhatian terhadap anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas

Mayoritas CSO menilai bahwa anak-anak rentan dan tertinggal dalam pembangunan, diikuti perempuan dan penyandang disabilitas. Merujuk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), masih banyak daerah yang belum menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan aksesibilitas dan infrastruktur. Selain itu, partisipasi pemerintah dengan kelompok disabilitas masih sektoral, dan organisasi disabilitas belum dilibatkan dalam proses perencanaan, penganggaran serta sistem informasi disabilitas yang terpadu.



Tantangan di Pilar Pembangunan SDGs



Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5) Kebijakan dinilai signifikan namun belum berdampak secara merata

Secara keseluruhan, kemajuan upaya pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial yaitu 40 pada level "Kemajuan rendah". Menurut CSO, kemajuan yang paling signifikan berada di **Tujuan 4 dan Tujuan 5**. Walaupun tetap ada berbagai tantangan, beberapa kemajuan di pilar ini dinilai cukup progresif. Misalnya besaran alokasi dana APBN ke sektor Pendidikan (minimal 20%) dan tersahkannya UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini adalah hasil kerjasama berbagai pihak selama 10 tahun pada sidang paripurna DPR RI ke-19 pada April 2022. Namun CSO menilai implementasinya hanya maksimal di tingkat nasional, sementara dampaknya belum terasa signifikan di daerah. Hal ini juga terlihat dari rendahnya kesadaran publik yang mendapat skor terendah (33%), mengindikasikan bahwa dampak pilar pembangunan sosial belum merata sampai ke masyarakat luas.

Pilar Pembangunan Ekonomi (Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17)

Jurang ketimpangan yang semakin melebar

CSO menilai kemajuan upaya pencapaian SDGs Pilar pembangunan ekonomi berada di level "Kemajuan rendah" dengan skor 38%. Meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat akibat kasus COVID-19 yang melanda tidak semata-merta memajukan pemerataan ekonomi. World Inequality Report (WIR) 2022 mencatat ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar sejak 1980 meskipun kebijakan ekonomi Indonesia yang sekarang dinilai progresif (rencana aksi mendapatkan skor tertinggi dari CSO di pilar ini). Belum signifikannya kebijakan ekonomi terhadap pengurangan ketimpangan perlu menjadi catatan perbaikan, khususnya bagi kementerian dan lembaga terkait.

Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15)

Kurangnya implementasi terhadap komitmen iklim
Menurut CSO, Pilar Lingkungan berada di skor 38% yaitu pada level "Kemajuan rendah". Bahkan menurut Climate Action Tracker (CAT), target dan komitmen iklim berada di tingkat "sangat tidak mencukupi". CAT menilai kebijakan dan komitmen iklim Indonesia justru mengarah pada peningkatan karbon yang tidak sesuai dengan Paris Agreement. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pengesahan Undang Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). CSO menilai UU ini sebagai bentuk kurangnya komitmen politik dan akuntabilitas Indonesia untuk mendorong transisi pembangunan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Pilar Hukum dan Tata Kelola (Tujuan 16)

Korupsi, penyelewengan kekuasaan dan otoritas negara yang otoriter

Pilar ini dinilai berada pada level "Kemajuan rendah" dengan skor 37%. Perlu diketahui SDGs 16+ bertindak sebagai *enabler* untuk mencapai SDGs secara keseluruhan yang menilai kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Sayangnya, Indonesia masih belum maksimal dalam pilar ini. Dari sisi demokrasi, Indonesia baru sampai di level "*Weak Democracy*" (IDEA, 2020). Di sisi lain, korupsi anggaran negara, korupsi ruang sipil dalam kebebasan berpendapat dan otoritas negara masih cukup dominan, seperti pembaruan secara sepihak UU Otonomi Khusus Papua, *informal surveillance*, pelecehan birokrasi, hingga *power abuse* yang dilakukan oleh oknum penegak hukum terhadap masyarakat sipil.



REKOMENDASI

1. Masyarakat sipil meminta agar pemerintah dapat fokus untuk **merevisi Kerangka Regulasi untuk mengakselerasi SDGs**, yaitu Perpres SDGs No.57 Tahun 2017 (92%), Pelibatan Multipihak (86%), Budget (83%), Inklusivitas (67%), dan Komunikasi Publik SDGs (64%).
2. Pemerintah diharapkan melakukan **tinjauan ulang dan menghapus regulasi dan praktik kebijakan yang bertentangan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan dan penghormatan hak-hak asasi manusia**, serta mendiskriminasi dan merepresi kelompok warga rentan.
3. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan **koherensi kebijakan SDGs antarkementerian lembaga, baik di tingkat nasional dan daerah**, dengan menyadari pentingnya bekerja secara sinergis, memahami konteks, mengidentifikasi konsekuensi negative yang tidak diinginkan, dan secara efektif mengelola *trade-off* yang tidak dapat dihindari di seluruh SDGs.
4. Pemerintah diharapkan dapat **menguatkan peran pemerintah daerah** baik secara formal dan material untuk mengakselerasi implementasi SDGs di tingkat daerah.
5. Pemerintah diharapkan dapat **meningkatkan kapasitas kementerian lembaga dan pemerintah daerah mengenai SDGs**, khususnya dalam penyusunan kebijakan dan budget yang efektif, partisipatif, berkelanjutan, berperspektif HAM, dan berpihak kepada kelompok rentan/terdampak.
6. Pemerintah diharapkan dapat **meningkatkan kualitas kerjasama multipihak** secara sinergis, bermakna dan terpadu dengan melibatkan lembaga non pemerintah, sejak dalam tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi kebijakan. Di satu sisi, CSOs diharapkan lebih konsisten untuk mendorong pencapaian SDGs di Indonesia dengan secara aktif terlibat dalam kerjasama multipihak.
7. **Pemerintah diharapkan mengubah cara pandang/norma terhadap kelompok minoritas** dengan memberikan upaya khusus, baik dalam bentuk kebijakan ataupun anggaran.
8. Pemerintah perlu **meningkatkan kualitas data terpilah** mengenai Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
9. Mendorong **Pengesahan Peraturan Presiden untuk Dana Abadi LSM/CSO (Endowment Fund)** yang dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel agar pendanaan dapat diakses oleh CSO untuk mendorong implementasi SDGs.
10. **Melakukan komunikasi publik SDGs yang terkoordinasi, masif dan menyesuaikan konteks lokal** untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai SDGs dan membuat masyarakat aktif terlibat dalam prosesnya.
11. **Memetakan kemajuan dan praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah** untuk kemudian ditampilkan dalam website SDGs Indonesia dan diberikan insentif serta dukungan agar inisiatif baik dapat memberikan inspirasi dan di scale up secara masif.
12. **Mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komitmen SDGs pada negara anggota G20**, untuk mengakselerasi pencapaian SDGs dalam Presidensi G20 Indonesia.
13. Memastikan pemahaman dan komitmen terhadap **SDGs dijadikan tolak ukur untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI dalam Pemilihan Umum Serentak 2024**.

Referensi:

- A4SD. (2022). Frequently Asked Questions on A4SD People's Scorecards. Retrieved from Action for Sustainable Development: <https://action4sd.org/sdg-scorecards-faq/>
- Anam, K. (2022, March 14). PT SMI Akselerasi Proyek Berbasis SDGs Lewat Platform SIO. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220314181731-4-322692/pt-smi-akselerasi-proyek-berbasis-sdgs-lewat-platform-sio>
- Antara. (2022, January 25). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 naik tipis 1 poin menjadi 38. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/2664137/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-naik-tipis-1-poin-menjadi-38>
- Climate Action Tracker. (2021, November 1). Country Summary Indonesia. Retrieved from <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>
- CIVICUS. (2022, May 19). Indonesia. Retrieved from Monitor Tracking Civic Space: <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>
- INFID. (2019). Studi Keterbukaan Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Daerah. Jakarta: INFID.
- INFID. (2019). Penilaian Fiskal dalam Rangka Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs yang Berperspektif Gender, Inklusif, dan Transformatif Jakarta: INFID.
- Kumparan Sains. (2018, March 28). Angka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Tertinggi Kedua di Asia Tenggara. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparansains/angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>
- Republic of Indonesia. (2021). Indonesia's Voluntary National Review 2021. Jakarta.
- SDSN. (2022, June 2). Sustainable Development Report 2022. Retrieved from Sustainable Development Report: <https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2022/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, June 14). Presiden Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Retrieved from <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-keluarkan-inpres-4-2022-tentang-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem/>
- Syahni, D. (2021, October 7). Gugat UU Minerba, Upaya Kurangi Beban Lingkungan dan Masyarakat. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2021/10/07/gugat-uu-minerba-upaya-kurangi-beban-lingkungan-dan-masyarakat/>
- World Economy Forum (2021, April 20) Fostering Effective Energy Transition 2021 edition. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/fostering-effective-energy-transition-2021/>

